



LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan Akademik
pada Program Diploma III Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Asal :	Hadah	S
Tempat :	15 JAN 2005	Kelas 351-72
Penyakit :		PUS
Pengantar :		P
		fan

Oleh :

Anita Puspaningtyas

NIM : 010803102467/AK

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2004

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

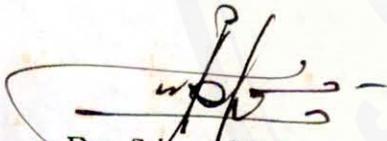
Nama : ANITA PUSPANINGTYAS
N. I. M. : 010803102467
Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN
Jurusan : Manajemen

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :
18 SEPTEMBER 2004

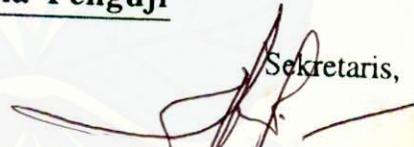
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,


Drs. Sriyono, MM
NIP.131 624 476

Sekretaris,


Drs. M. Syaharuddin, M.Si
NIP.131 474 384

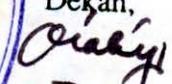
Anggota,


Drs. Sunardi, MM
NIP.131 472 803



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,




Drs. LIAKIH, SU
NIP.130 531 976

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : ANITA PUSPANYTYAS
NIM : 010803102467
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN
PAJAK REKLAME PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER
DOSEN PEMBIMBING : Drs. SUNARDI, MM
Laporan Praktek Kerja Nyata ini telah disetujui pada tanggal : Juli 2004

DOSEN PEMBIMBING



Drs. SUNARDI, MM

NIP. 131.472.803

MOTTO

**Akal dan ilmu ibarat jiwa dan raga
Tanpa raga, jiwa hanyalah udara hampa
Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tanpa makna
(Kahlil Gibran)**

**Berusahalah untuk membuat mimpi menjadi kenyataan
Dan
Merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin
(Pribadi)**

**Hidup seperti lilin lebih mulia daripada hidup seperti gula
Gula rela hancur hanya untuk kenikmatan semata
Sedangkan lilin rela hancur untuk sebuah penerangan
(Pribadi)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Ayahanda dan ibunda (kalian adalah orang terhebat yang dikirim Tuhan untuk membuatku ada dan berkesempatan menikmati dunia)
2. Kakak-kakakku: Yolanda, Rizky dan Lina (menjadi dewasa adalah hukum alam, namun yang terpenting adalah keyakinan kita untuk tetap menjadi saudara selamanya)
3. Teman-teman seperjuangan: Indah, Arie, Yeni, Yulia dan semua teman-teman 01-AK/GL (Semoga pertemanan kita menjadi sebuah kisah yang abadi)
4. Sahabat-sahabatku : Celvi, Arie, Andy, Dian, Kiky, Anik, Zein dan Decky (Dulu duniaku hanya dua warna hitam dan putih, kehadiran kalian membuatku mengenal merah, jingga, biru, kuning dan hijau)
5. Indonesiaku (Semoga menjadi lebih baik)
6. Almamaterku

Kata pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesainya laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul :

“ PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER ”

yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata ini serta dalam menyelesaikan laporan ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran serta fasilitas yang membantu hingga akhir penulisan laporan ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Sunardi, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Sriono, MM selaku Ketua Program Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Rifa'i selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember
6. Seluruh karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Bapak Munari, Bapak Amin, Bapak Priyanto WM, Bapak Suparto, Bapak Taufik dan Bapak Seger)
7. Bapak dan ibu yang tak pernah berhenti memberi doa dan dukungan
8. Kakak-kakakku, Yolanda, Rizky dan Lina.
9. Teman-temanku, Indah, Arie, Yeni (kita berjuang bersama dan kelak kita akan merasakan keindahan masa-masa kuliah ini)

10. Seluruh teman-teman 01-AK/GL.
11. Keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna, baik menyangkut aspek materi maupun tehnik penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Jember, Juli 2004

penulis



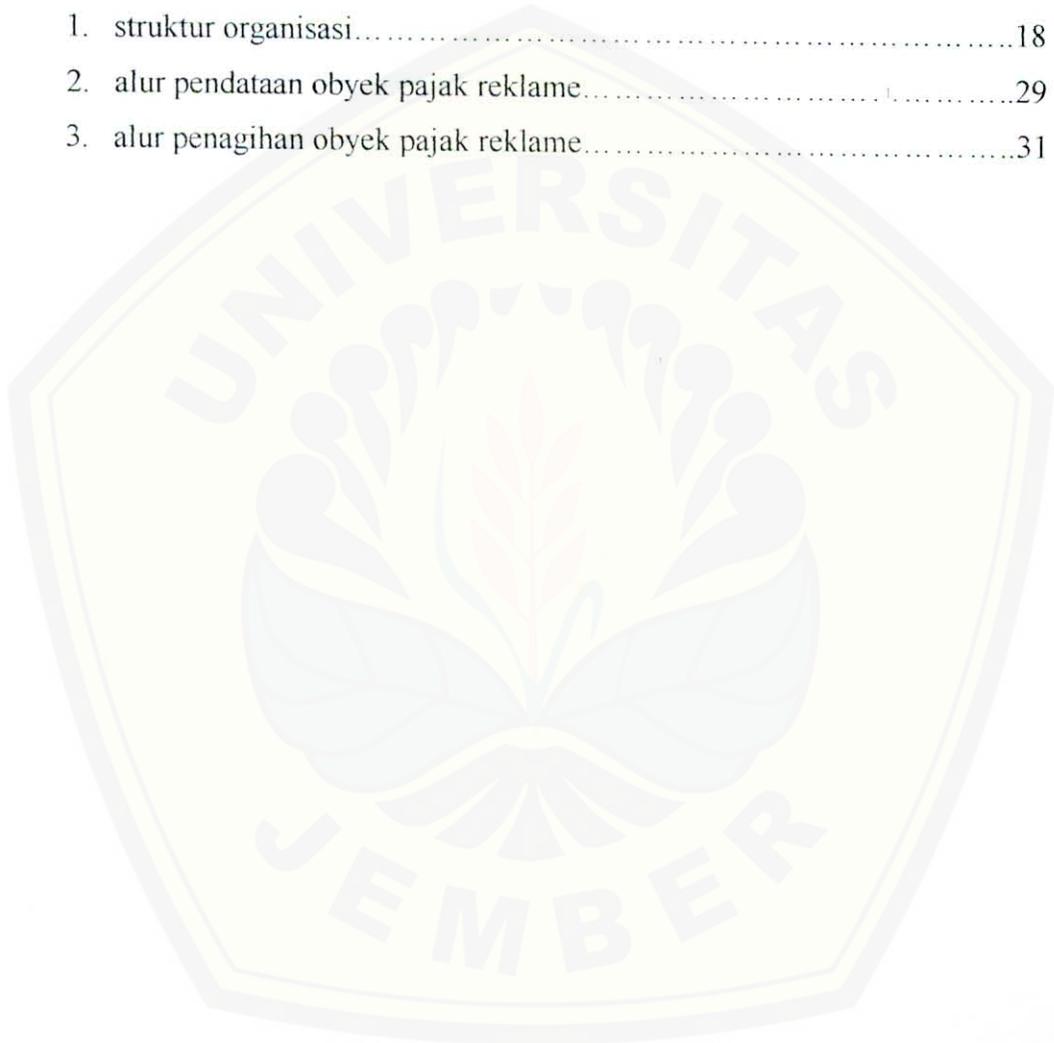
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan	
1.2.1 tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Obyek dan waktu pelaksanaan PKN	
1.3.1 Obyek PKN.....	3
1.3.2 Waktu PKN.....	3
1.4 Jadwal kegiatan PKN.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 ADMINISTRASI	
2.1.1 Pengertian administrasi.....	5
2.1.2 unsur-unsur administrasi.....	5
2.1.3 Tujuan Administrasi.....	6
2.2 PAJAK	
2.2.1 pengertian pajak.....	7

2.2.2 sifat pajak.....	7
2.2.3 unsur pajak.....	7
2.2.4 jenis pajak.....	9
2.3 REKLAME	
2.3.1 Pengertian reklame.....	10
2.3.2 jenis reklame.....	10
2.3.3 obyek dan subyek pajak reklame.....	10
2.3.4 lokasi pemasangan reklame.....	11
2.3.5 pencabutan reklame.....	12
2.3.6 dasar pengenaan pajak reklame.....	13
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PKN	
3.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah.....	15
3.2 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.....	16
3.3 Wewenang Dinas Pendapatan Daerah.....	16
3.4 Struktur Organisasi.....	17
3.5 pengangkatan dan pemberhentian jabatan.....	25
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	
4.1 Pelaksanaan administrasi penagihan pajak reklame	
4.1.1 Administrasi rekapitulasi pajak reklame.....	26
4.1.2 administrasi rekapitulasi SKP.....	28
4.1.3 Administrasi pendistribusian SKP.....	29
4.1.4 Administrasi penghitungan pajak reklame.....	32
4.1.5 Administrasi penerimaan keberatan.....	34
4.1.6 Administrasi pembayaran pajak reklame.....	35
4.2 Aktivitas selama Praktek Kerja Nyata.....	36
BAB V KESIMPULAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. struktur organisasi.....	18
2. alur pendataan obyek pajak reklame.....	29
3. alur penagihan obyek pajak reklame.....	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jadwal kegiatan PKN.....	1
2. Pengisian kolom SKP.....	37
3. Pengisian kolom surat perforasi.....	38
4. Pengisian kolom tanda setoran.....	39
5. Pengisian pembukuan pajak reklame.....	40
6. Pengisian kolom SPT.....	41
7. Pegisian kolom penerimaan dan tunggakan.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat ketetapan pajak.....	47
2. Surat perforasi.....	48
3. Surat tanda setoran.....	49
4. Surat izin praktek kerja nyata.....	50
5. Daftar absensi.....	51
6. Surat keterangan telah melaksanakan PKN.....	52
7. Kartu konsultasi.....	53



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, yang merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta memiliki wilayah geografis yang luas. Kekayaan akan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia merupakan suatu modal untuk meningkatkan pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebab kemakmuran dan keadilan merupakan cermin keberhasilan suatu bangsa dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan suatu pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, oleh karena itu antara pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung satu sama lain. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sebaliknya masyarakat harus berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu pembangunan yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan mentaati peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, sebab pemungutan pajak di Indonesia dilindungi oleh dasar hukum yaitu undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara, misalnya untuk biaya pengembangan teknologi, biaya kunjungan presiden ke negara lain, biaya impor barang, dan lain-lain. Pemungutan pajak diharapkan tidak membebani masyarakat sebab pajak itu sendiri dipungut dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, selain itu pajak juga berfungsi untuk

mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ketentuannya dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah Otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten. Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, Pajak Daerah Tingkat Propinsi dan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten. Pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam rumah tangga daerah misalnya, biaya perbaikan sarana pendidikan, biaya perbaikan tempat ibadah, biaya perbaikan jalan, biaya pengelolaan daerah wisata, dan lain-lain. Pajak reklame adalah salah satu pajak yang memberikan pemasukan cukup besar bagi kas daerah, sebab pada masa ini reklame semakin banyak yang menggunakan. Reklame dianggap sebagai mediator paling efektif oleh pihak tertentu baik perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat luas, sehingga produk tersebut lebih mudah dikenal. Dengan meluasnya penggunaan reklame semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pendapatan, yang dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi penagihan pajak khususnya pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Membantu pelaksanaan administrasi penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, untuk mengetahui, mendalami, dan mengerti tentang pelaksanaan administrasi penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan khususnya di bidang administrasi penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Dalam melaksanakan praktek kerja nyata ini, penulis mengambil lokasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berada di Jalan Jawa 72 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan selama $\pm 1\frac{1}{2}$ bulan. Perhitungan jangka waktu tersebut diselesaikan dengan 144 jam efektif sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh Fakultas. Pembagian waktu Praktek Kerja Nyata sebagai berikut :

Hari Senin – Kamis : 07.00 – 14.00 WIB

Hari Jumat : 07.00 – 10.00 WIB

1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah yang berkaitan dengan judul yaitu meliputi :

- a. dasar-dasar manajemen
- b. administrasi perkantoran modern
- c. perpajakan
- d. referensi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Berikut ini disajikan rincian jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seperti tercantum dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 : Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Kegiatan	Minggu Ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Mengawali pelaksanaan Praktek kerja Nyata	X					
2	Perkenalan dengan Karyawan Dinas Pendapatan Daerah	X					
3	Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	X	X	X	X	X	X
4	Penyusunan Konsep Laporan					X	X
5	Mengakhiri Praktek Kerja Nyata						X



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi

2.1.1 Pengertian Administrasi

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *Administration* yang bentuk inisialnya adalah *to administrate* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Perkembangan istilah administrasi di Indonesia ada dua macam pandangan yaitu, administrasi diartikan sebagai tata usaha dan administrasi diartikan sebagai kegiatan pengelolaan Human Resources dan Material Resources termasuk pengelolaan informasi atau kegiatan tata usaha.

Secara garis besar administrasi menurut The Lian Gie (1993 : 11) mempunyai dua pengertian :

1. Administrasi dalam arti luas

administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha, kegiatan ini bersifat merencanakan, mengorganisasi, dan memimpin.

2. Administrasi dalam arti sempit

kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha (organisasi) untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (The Lian Gie, 1993 : 12).

2.1.2 Unsur-unsur Administrasi

Walaupun administrasi merupakan proses penyelenggaraan namun untuk tata tertib pelaksanaannya dapat dibedakan dalam 8 unsur, (The Lian Gie, 1993: 10) yaitu :

1. Pengorganisasian
rangkain kegiatan menyusun kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dari usaha kerjasama yang bersangkutan.
2. Manajemen
rangkain perbuatan menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai.
3. Tata Hubungan
rangkain perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha kerjasama itu.
4. Kepegawaian
rangkain perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama itu.
5. Keuangan
rangkain perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama itu.
6. Perbekalan
rangkain perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftarkan, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan dalam usaha kerjasama itu.
7. Tata Usaha
rangkain perbuatan menghimpun mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama itu.
8. Perwakilan
rangkain perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling dalam usaha kerjasama itu.

2.1.3 Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi menurut Soemitra Adi Koesuma (1993 : 5) adalah :

1. memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisis mengenai aktivitas-aktivitas operasional yang terdapat dalam perusahaan.

2. memberikan informasi secara terperinci mengenai orang-orang, obyek-obyek, operasi-operasi, persetujuan-persetujuan untuk melaksanakan keputusan-keputusan, peraturan dan perjanjian.
3. mencatat pekerjaan yang harus dilakukan.
4. mengatur komunikasi antara perusahaan dengan konsumen.
5. menyimpan perhitungan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pemeriksaan perusahaan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara tetapi berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal (*contra prestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan jasa yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Soemitro SH, 2001 : 1 dalam Mardiasmo).

2.2.2 Sifat Pajak

1. memaksa secara kuat, yuridis dan ekonomi.
2. tidak ada imbalan langsung kepada pembayar.
3. sepanjang memenuhi syarat-syarat formil dan materiil maka tidak ada alternatif untuk mau / tidak mau membayar.
4. peraturan pajak dapat digunakan untuk tujuan budgeter, mengatur dan tujuan tambahan lainnya.

2.2.3 Unsur-unsur Pajak

1. ada masyarakat / kepentingan umum.
2. ada surat ketetapan pajak.
3. ada undang-undang pajak yang mendasari.
4. ada penguasa pemungut pajak.
5. ada subyek pajak.
6. ada obyek pajak.

2.2.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak :

1. Teori Asuransi

negara melindungi jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat maka rakyat harus membayar pajak, ibarat suatu premi asuransi yang dijamin perlindungannya.

2. Teori Kepentingan

membagi beban pajak kepada rakyat berdasarkan kepentingan perlindungan masing-masing orang. Makin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

pajak dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang / wajib pajak.

4. Teori Bakti

dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian negara menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Hukum Pajak

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil (merupakan wujud pelaksanaan hukum pajak materiil).

2.2.6 Jenis-Jenis Pajak

1. Menurut golongannya, dibedakan menjadi 2 :

a. Pajak langsung

a.1 Ditinjau dari sudut ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang kewajiban membayarnya tidak dapat dibebankan kepada orang lain / pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

a.2 Ditinjau dari sudut administrasi, maka yang tergolong pajak langsung adalah pajak yang cara pemungutannya secara berkala atau periodik serta terikat pada tahun pajak.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pajak tidak langsung

b.1 Ditinjau dari sudut ekonomi, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang kewajiban membayarnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b.2 Ditinjau dari sudut administrasi, pajak tidak langsung pemungutannya tidak periodik atau tidak terikat pada tahun pajak dalam arti hanya dikenakan setiap ada perbuatan atau peristiwa yang dijadikan obyek pajak.

2. Menurut sifatnya, dibedakan menjadi dua :

a. Pajak Subyektif

adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya dengan memperhatikan wajib pajaknya.

b. Pajak Obyektif

adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan wajib pajaknya.

3. Menurut lembaga pemungutnya, dibedakan menjadi dua:

a. Pajak Pusat

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang terjadi dalam rumah tangga daerah.

2.3 Reklame

2.3.1 Pengertian Reklame

Menurut Perda Kabupaten Jember No. 9 Tahun 1998, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

2.3.2 Jenis-jenis reklame yang masih berlaku

Reklame dibedakan dalam dua kategori yaitu :

1. reklame tetap, misalnya papan nama atau *billboard*
2. reklame Insidental terdiri dari :
 - a. reklame kain
 - b. reklame melekat (stiker)
 - c. reklame selebaran
 - d. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan)
 - e. reklame film (*slide*)

2.3.3 Obyek dan Subyek Pajak

1. Obyek pajak reklame ialah semua penyelenggaraan reklame.
2. Subyek pajak reklame ialah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

2.3.4 Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah

- a. penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

2.3.5 Kawasan / Zone Reklame

Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

2.3.6 Lokasi / Tempat Pemasangan Reklame

1. Baliho

Pemasangan Baliho :

- a. diutamakan dilokasi / tempat-tempat pemasangan reklame yang telah disediakan.
- b. ditempat-tempat lain yang ditunjuk dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.

2. Reklame Selebaran

reklame selebaran boleh disebarkan di dalam kota Jember akan tetapi tidak boleh dilemparkan / ditaburkan / ditempelkan.

3. Reklame Tempel

- a. dilarang ditempelkan di shelter bus.
- b. apabila ditempelkan di gedung, pagar rumah, tembok atau pohon harus seizin pemiliknya.
- c. boleh dipasang di pinggiran kota.

4. Spanduk

- a. diutamakan pada tempat pemasangan reklame yang telah disediakan, panggung reklame dan sekitarnya serta tidak boleh dipasang melintang di jalan.
- b. setelah tempat pemasangan penuh, maka pemasangan diperkenankan melintang jalan dengan lokasi-lokasi sebagai berikut:
 1. di sebelah barat kota Jember mulai Jalan Hayam Wuruk ke barat.
 2. di sebelah timur kota Jember mulai pertigaan Jalan Letjen S. Parman ke timur.

3. di sebelah utara kota Jember mulai pertigaan Jalan PB. Sudirman, Jalan Nusa Indah ke utara.
 4. sepanjang Jalan Jawa, Jalan Karimata, Jalan Mastrip sesudah bundaran ke timur.
5. Reklame Tetap
- a. reklame tetap yang di pasang di rumah / toko / perusahaan dan bukan milik rumah / toko / perusahaan tersebut harus meminta izin dari pemilik rumah / toko / perusahaan yang ditempati dan apabila berakibat lain yang merugikan menjadi tanggung jawab serta beban pemilik pemasang reklame.
 - b. reklame tetap yang dipasang di rumah / toko / perusahaan milik sendiri harus dijaga keberadaannya agar tidak mengganggu dan merugikan pihak lain.
 - c. reklame tetap yang dipasang dirumah / toko / perusahaan atas tanah milik negara maka harus dibayar semuanya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
 - d. apabila bentuk, bunyi, teks atau gambar reklame berubah maka harus diajukan izin baru.

2.3.7 Pencabutan / Penghapusan / Penurunan Reklame

reklame yang ada harus dicabut / diturunkan apabila:

1. tidak mendapat izin pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. melanggar / tidak mematuhi aturan perundangan yang berlaku.
3. mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban umum.
4. penempatan dan isi reklame tidak sesuai atau diadakan perubahan dari yang diajukan semula.
5. telah habis masa berlaku pajak maupun izinnya.

2.3.8 Hal-hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pemasang Reklame

- a. mengajukan izin pemasangan dan menyelesaikan pajaknya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. dipasang pada tempat yang telah ditentukan sesuai dalam izinnya.
- c. apabila sudah habis masa berlakunya maka pemasang reklame dapat melakukan perpanjangan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- c.1 reklame tetap : 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya izin / pajaknya harus segera mengajukan perpanjangan.
- c.2 reklame insidentil : 2 (dua) hari sebelum habis masa berlakunya izin / pajaknya harus segera mengajukan perpanjangan.
- d. apabila pemasang reklame tidak berniat melakukan perpanjangan maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - d.1 reklame tetap : 2 (dua) minggu sesudah habis masa berlakunya izin / pajaknya segera diturunkan.
 - d.2 reklame insidentil : 2 (dua) hari sesudah habis masa berlakunya izin / pajaknya harus segera diturunkan.
- e. sebagai upaya menjalin kerja sama yang baik antara pemasang reklame dengan pemberi izin, maka untuk penurunan reklame yang sudah habis masa berlakunya, pemasang reklame diharapkan membayar biaya penurunan dengan rincian sebagai berikut:
 - e.1 reklame tetap = 20% dari nilai pembuatan reklame tersebut.
 - e.2 reklame insidentil yang terdiri dari :
 - spanduk dan umbul-umbul = Rp 15.000,- / lembar
 - baliho = Rp 25.000,- / lembar
 - reklame tempel = Rp 5.000,- / lembar

2.3.9 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

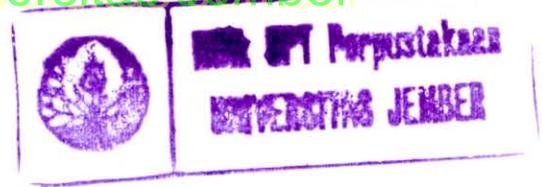
Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame yang dimaksud adalah penjumlahan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria-kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Nilai strategis ini ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. guna lahan (potensi dari tempat / kawasan dalam mencapai setoran pemasangan reklame)
- b. ukuran reklame
- c. sudut pandang reklame
- d. kelas jalan

e. harga titik / lokasi pemasangan reklame

Nilai jual obyek pajak adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik ataupun penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi dan lain sebagainya sampai dengan reklame tersebut selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.





BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PKN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Jember bermula sejak tahun 1859 seiring dengan mulai dikenalnya tanaman tembakau di daerah ini. Berdasarkan Staatblat no. 332 tahun 1929, pada tanggal 1 Januari 1929 secara administratif kota Jember menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada tahun 1950 sesuai staatblat no 12 tahun 1950, mulai dibentuk Pemerintah Daerah di Jember yaitu pemerintah daerah tingkat II Jember. Selanjutnya sejalan dengan terbentuknya pemerintah daerah tingkat II Jember, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II Jember, salah satu unsur pelaksana tersebut adalah di bidang pendapatan. Unsur pelaksana di bidang pendapatan mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Adapun pergantian nama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Pajak Daerah.
2. Sub Direktorat Pendapatan Daerah.
3. Dinas Pendapatan Daerah.

Di dalam unsur pelaksana bidang pendapatan ini termasuk pula di dalamnya dinas pasar, namun sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi dan tata kerja dinas pasar. Sesuai dengan peraturan daerah no 39 tahun 2000, dinas pasar lepas dari dinas pendapatan daerah dan berdiri sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi perubahan-perubahan dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya. Dengan berlakunya otonomi daerah maka terjadi perombakan-perombakan dalam organisasi perangkat daerah. Salah satunya adalah di keluarkannya PP no 8 tahun 2003 yang menggabungkan kembali dinas pasar dengan dinas pendapatan daerah. Jember yang semula merupakan daerah tingkat II kini menjadi daerah kabupaten.

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendapatan.

3.2 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan.
4. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
6. Membina, mengelola dan mengembangkan pasar.
7. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat.
8. Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
9. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar.
10. Menyelenggarakan penarikan / pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.3 Wewenang Dinas Pendapatan Daerah

1. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
2. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan.
3. Mengalokasi sumber daya manusia potensial.
4. Meneliti yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan.
5. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja.
6. Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

7. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
8. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menetapkan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan di bidang pendapatan.
10. Menyelenggarakan dan pengawasan standart minimal di bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
11. Menyusun rencana bidang pendapatan daerah.
12. Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa.
13. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan daerah.
14. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.
15. Menetapkan dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.4 Struktur Organisasi

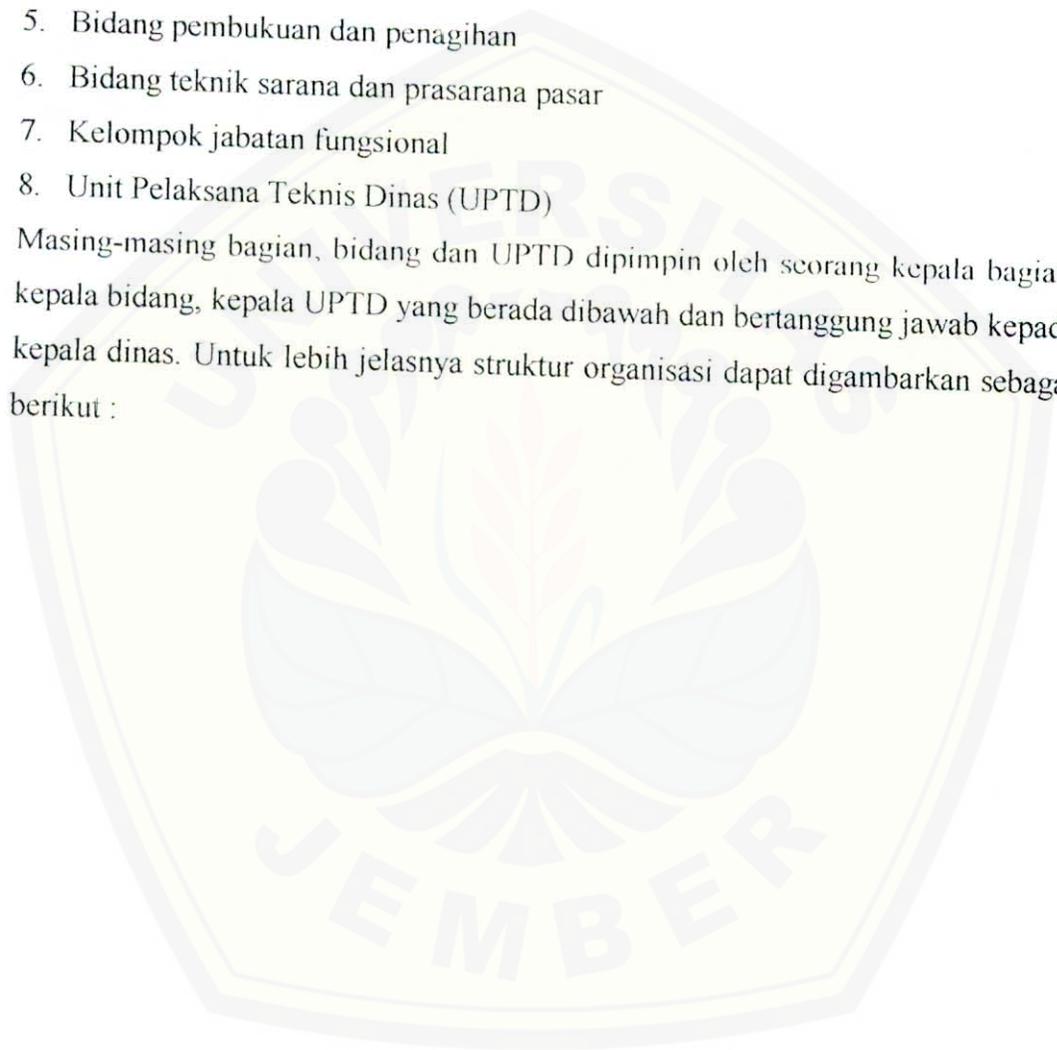
Struktur organisasi merupakan kerangka yang dapat menunjukkan segenap tugas pekerjaan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Pada dasarnya dalam struktur organisasi dapat kita peroleh gambaran tentang :

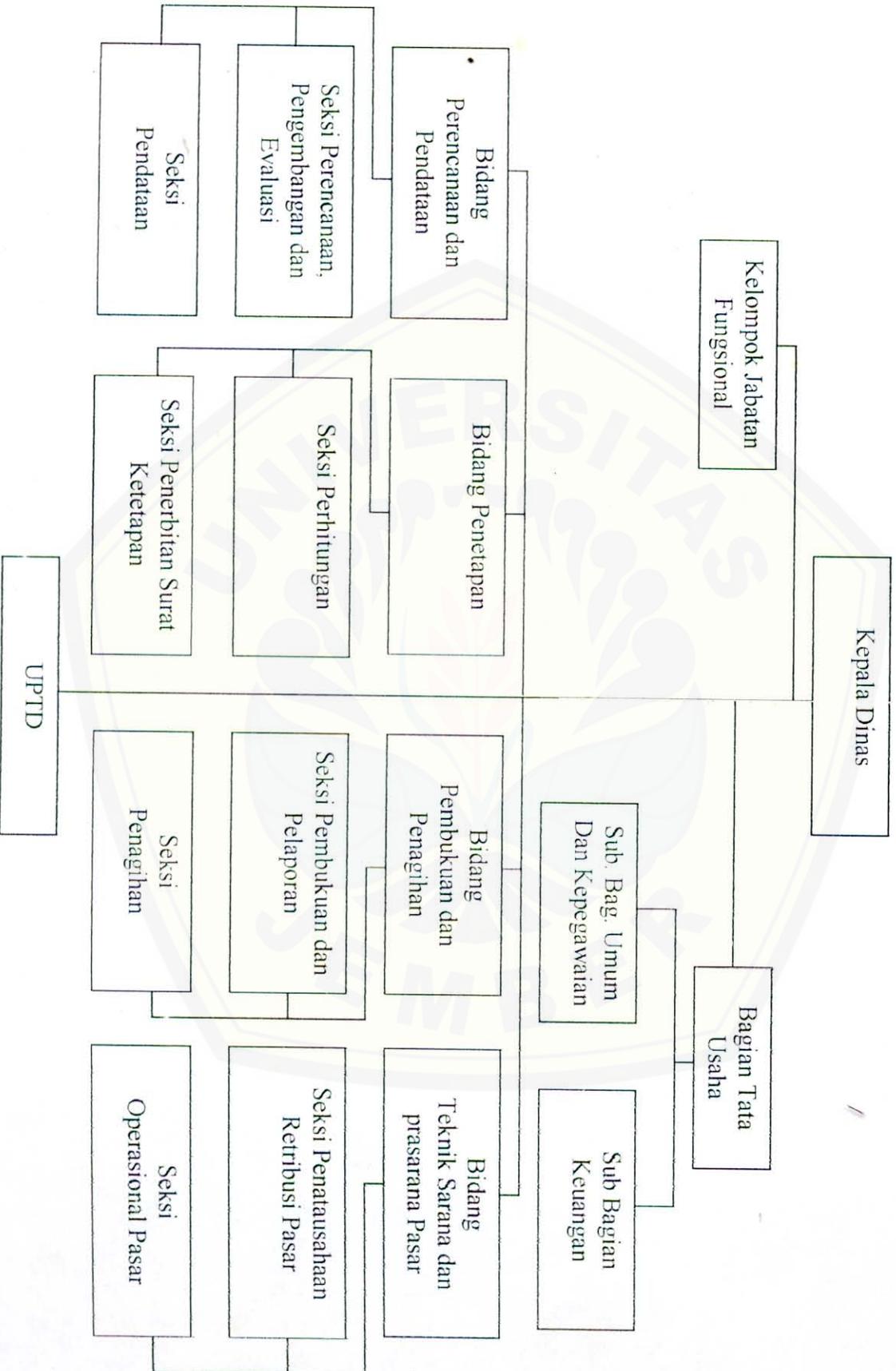
1. Besarnya organisasi termasuk pembagian isinya dalam satuan-satuan organisasi.
2. Saluran-saluran perusahaan dan tanggung jawab dari pucuk pimpinan sampai ke bawah dan sebaliknya, serta hubungan-hubungan yang ada diantara satuan-satuan organisasi, jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut dan bila perlu berikut nama jabatannya, tingkat pangkat bahkan potretnya.

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, organisasi terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Bagian tata usaha
3. Bidang perencanaan dan pendataan
4. Bidang penetapan
5. Bidang pembukuan dan penagihan
6. Bidang teknik sarana dan prasarana pasar
7. Kelompok jabatan fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Masing-masing bagian, bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala bagian, kepala bidang, kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Bulan Maret 2004
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Bulan Maret 2004

Adapun pembagian tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- 1). Kepala dinas pendapatan daerah mempunyai tugas yaitu :
 - a. menyusun program kerja di lingkungan kerja.
 - b. membagi fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - c. memberi petunjuk dan bimbingan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - d. mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang ada di lingkungan dinas pendapatan daerah.
 - e. mengevaluasi hasil kerja.
 - 2). Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi tata laksana.
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
 - d. melaksanakan penyusunan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan.
 - e. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas pendapatan daerah.
- Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu :
- a. menyelenggarakan tata usaha Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. menyelenggarakan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan kesejahteraan pegawai.
 - d. melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain.

- e. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang dinas.
- f. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku.
- g. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas.
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan.
- i. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas.
- j. menyelenggarakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu.
- k. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi yaitu :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran.
- b. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah.
- c. mengolah data usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah.
- d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi.
- e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
- f. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagaimana pengeluaran dinas.
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan.

3). Bidang Perencanaan dan Pendataan mempunyai fungsi yaitu :

- a. membuat penyusunan rencana di bidang pendapatan.
- b. membuat penyusunan kebijakan teknis serta program kerja tahunan di Bidang Pendapatan.
- c. membuat analisa terhadap penggalian potensi daerah dibidang pendapatan.
- d. melakukan pendataan terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak / wajib retribusi.

- f. melakukan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menyusun daftar induk yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pendapatan daerah.
- h. menginventarisasikan permasalahan di bidang pendapatan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

Bidang Perencanaan dan Pendataan terdiri dari :

- a. Seksi perencanaan, pengembangan dan evaluasi.
- b. Seksi pendataan.

Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun rencana pendapatan daerah melalui program kerja secara intensifikasi atau ekstensifikasi.
- b. melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. melakukan pengkajian terhadap pengembangan obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. mengadakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara periodik atas penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Negara dan penerimaan lain-lain.

Seksi Pendataan mempunyai tugas yaitu :

- a. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pembuatan laporan.
- b. menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- c. menghimpun dan mengelola data obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan untuk dibuat dalam registrasi, pengklasifikasian jenis dan golongan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. memberikan pelayanan informasi secara teknis atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pihak lain yang memerlukan.

- e. membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak dan menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4) Bidang Penetapan mempunyai tugas yaitu:

- a. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. melakukan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Perhitungan
- b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas yaitu:

- a. menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan.

Seksi penerbitan surat ketetapan mempunyai tugas yaitu:

- a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi serta Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya.
- b. melakukan pemeriksaan dan meneliti kembali penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang melalui Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- c. melakukan klarifikasi / pemeriksaan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dengan membandingkan hasil yang diperoleh / penerimaannya.
- d. menginventarisasi dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang didistribusikan kepada wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah.

5). Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas yaitu:

- a. melaksanakan pencatatan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kartu pengawasan pembayaran dan daftar himpunan pokok pembayaran.
- b. melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan.
- c. melakukan perhitungan jumlah angsuran / pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang disetujui.

Bidang pembukuan dan penagihan terdiri dari:

- a. Seksi pembukuan dan pelaporan.
- b. Seksi penagihan.

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas yaitu:

- a. menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan Surat Ketetapan lainnya.
- b. menyiapkan laporan periodik realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan asli daerah.
- c. menyiapkan laporan berkala realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan penagihan.

Seksi penagihan mempunyai tugas yaitu:

- a. melakukan perhitungan kembali atas pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada wajib pajak dan wajib retribusi maupun pada petugas pemungut.
- b. menerima dan melayani surat permohonan keringanan penetapan pajak atau retribusi.
- c. membantu melaksanakan penagihan terhadap bagi hasil pajak dan bukan pajak.

- 6). Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas yaitu:
- menyelenggarakan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana serta menyiapkan standard harga untuk pemakaian stand.
 - melaksanakan tugas penilaian dan rekomendasi perencanaan stand.
 - melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana pasar.

Bidang teknik sarana dan prasarana pasar terdiri dari:

- Seksi penatausahaan retribusi pasar.
- Seksi operasional pasar.

Seksi penatausahaan retribusi pasar mempunyai tugas yaitu:

- mengumpulkan, menyusun secara sistematis dan mengolah data di bidang pendapatan dan jumlah pedagang di lingkungan pasar.
- menyelenggarakan pengelolaan pendapatan retribusi.
- membukukan semua penerimaan pada buku harian.

Seksi operasional pasar mempunyai tugas yaitu:

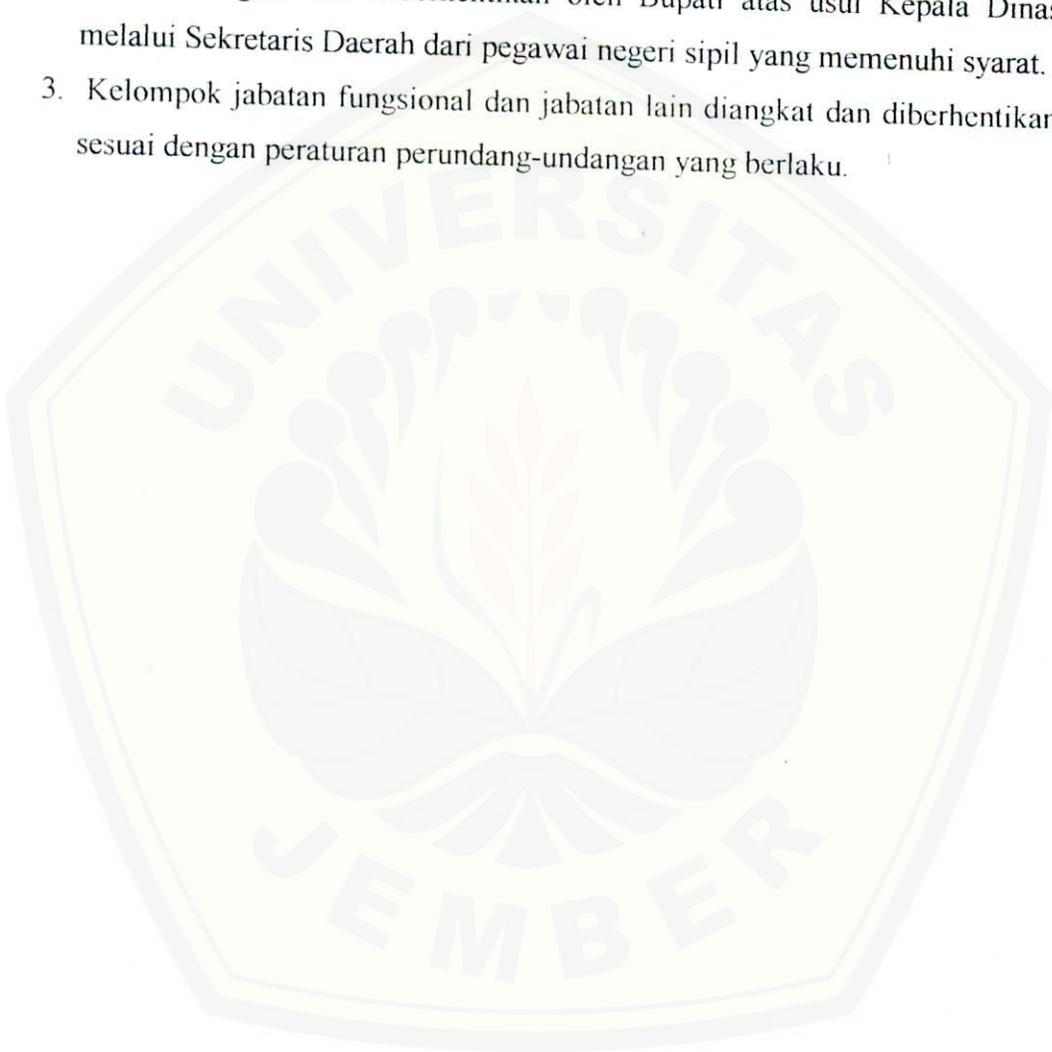
- melaksanakan usaha dan kegiatan pengawasan dan pengamanan teknis operasional pasar.
- mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar, serta melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban pasar.

7). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai keahliannya.

8). Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas.

3.5 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
2. Kepala Bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
3. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data-data yang telah terkumpul mengenai pelaksanaan administrasi penagihan pajak reklame, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati. Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang pendapatan.
 - b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pengelolaan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Perencanaan dan Pendataan
 - d. Bidang Penetapan
 - e. Bidang Pembukuan dan Penagihan
 - f. Bidang Tekhnis Sarana dan Prasarana Pasar
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
2. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak. Nilai strategis dapat ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :
 - a. Guna lahan
 - b. Ukuran reklame
 - c. Sudut pandang reklame

- d. Kelas jalan
- e. Harga titik / lokasi pemasangan reklame
3. Letak strategis ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi A
Pemasangan papan reklame di jalan PB Sudirman, A Yani, Trunojoto, Gajahmada, Dr Wahidin, Cokroaminoto, Kartini, Sultan Agung, Diponegoro, Syamanhudi dan Untung suropati
 - b. Klasifikasi B
Pemasangan papan reklame di wilayah kecamatan kaliwates, patrang, sumpersari dan diluar wilayah klasifikasi A
 - c. Klasifikasi C
Pemasangan reklame diluar wilayah klasifikasi B
4. Nilai jual obyek pajak adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame yang termasuk didalamnya biaya pemeliharaan yang didasarkan pada standart biaya yang dikeluarkan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi A minimal biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150.000
 - b. Klasifikasi B minimal biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 100.000
 - c. Klasifikasi C minimal biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 75.000
5. Proses pendataan obyek pajak reklame papan adalah sebagai berikut :
 - a. Petugas mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan obyek pajak, misalnya luas papan dan letak papan reklame.
 - b. Petugas menyerahkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk diisi
 - c. Petugas membawa SPT yang telah diisi untuk diproses menjadi Daftar Hasil Pendataan (DHP)
 - d. DHP ditandatangani oleh kepala dinas pendapatan daerah
 - e. DHP diserahkan kembali kepada wajib pajak

6. Proses penagihan terhadap wajib pajak reklame papan adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendapatan Daerah membuat Surat Ketetapan Pajak berdasarkan daftar hasil pendataan. SKP berisi keputusan mengenai besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. SKP diserahkan kepada Bidang Penetapan untuk ditetapkan atau disahkan
 - c. SKP yang telah ditetapkan ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Kepala Tata Usaha.
 - d. SKP yang telah ditandatangani didistribusikan ke bagian penetapan dan bagian pembukuan masing-masing satu lembar untuk arsip, sedangkan tiga lembar lainnya diserahkan kepada bagian penagihan.
 - e. Bagian penagihan membawa SKP tersebut kepada wajib pajak unruk melakukan penagihan.
 - f. Hasil yang didapat dari penagihan tersebut diserahkan kepada Bendahara dengan menggunakan Tanda Setoran (TS).
 - g. Bendahara menyetor kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
7. Untuk pemasangan reklame insidental seperti spanduk, umbul-umbul, baliho harus mendapat legalitas terlebih dahulu sebelum dipasang. Dalam rangka mewujudkan Jember terbina dilarang memasang reklame di wilayah segitiga emas. Apabila tidak mematuhi larangan maka akan diadakan penurunan secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

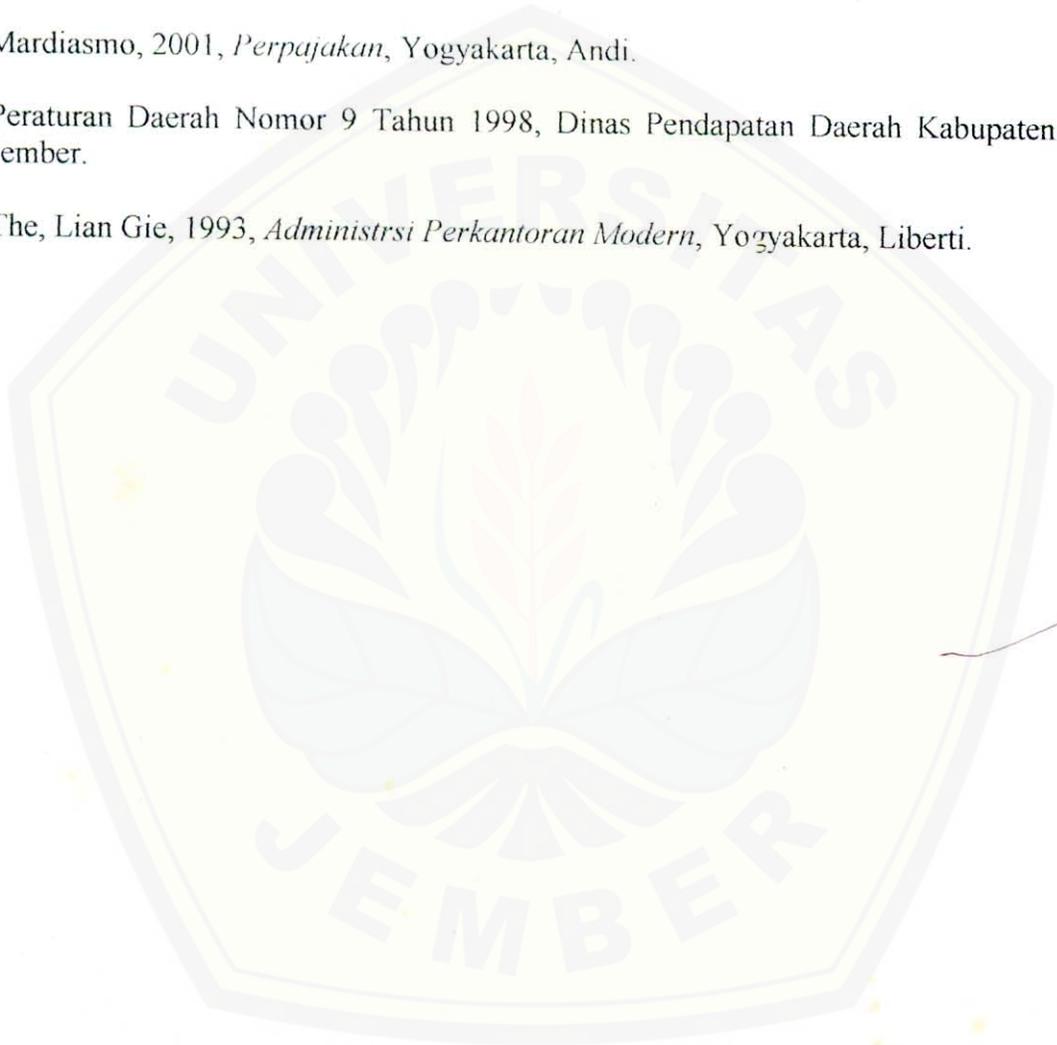
Kusuma, Adi Soemitro, 1993, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung, Sinar Baru

Manual Pendapatan Daerah, 1998, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

The, Lian Gie, 1993, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, Liberti.



SURAT PERMINTAAN PERFORASI

Tanggal

Kepada Yth. : Bendaharawan Khusus Benda
Berharga Dipenda Kabupaten Jember

Mohon agar dapat di perforasi sebagai berikut :

Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai Lembar	Banyaknya		
			Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah Lembar

Disetujui oleh,
Ka. Dipenda Kabupaten Jember

Diperiksa oleh,
Kasubdin. Ret & Pendpt Lain - lain

Pemohon.

.....
NIP.:

.....
NIP.:

.....
NIP.:

Lampiran : _____

Tahun Anggaran _____

TANDA SETORAN NO. _____

Bendahara Pemerintah Kabupaten Jember, diharap menerima uang sejumlah :

Rp. _____ (_____)

ialah pendapatan _____

selama masa _____ 2001

PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT

Ayat _____	(_____)	Rp. _____
" _____	(_____)	- _____
" _____	(_____)	- _____
" _____	(_____)	- _____
" _____	(_____)	- _____
" _____	(_____)	- _____

Jumlah Rp. _____

Setoran lalu semacam Rp. ini : _____ 2001

tanggal _____ No. _____

Dibuat untuk Orig. / Dupl. / Tripl. / Quadr. / Fifth.

_____ (Jabatan)

_____ (Tanda tangan)

TANDA PENERIMAAN NO. _____

Jumlah tersebut diatas Rp. _____ (_____)

) telah saya terima

_____ 2001
BENDAHARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Nº 014050



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jalan Letjen S Parman No 89 ☎ 337853 Jember

Jember, 29 Desember 2003

Nomor : 072/376.436.46/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : IJIN PRAKTEK KERJA

K E P A D A
Yth. Sdr. Ka. DISPENDA
Kabupaten Jember
di -

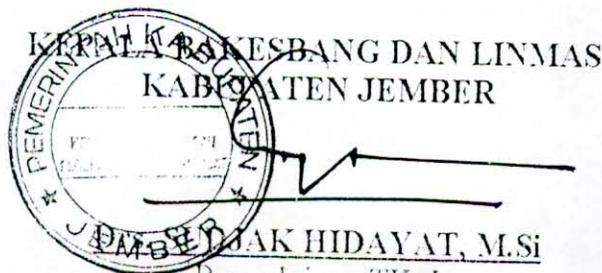
J E M B E R

Memperhatikan Surat Fakultas Ekonomi Univ. Jember, tanggal 22 Desember 2003, Nomor : 4939/J25.1.4/P.5/2003, Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Praktek Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan praktek kerja dimaksud, diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat/keterangan seperlunya kepada :

Nama : ANITA PUSPANINGTIYAS / 01.2467
Alamat : JL. HALMAHERA III/4 JEMBER.
Pekerjaan : MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI D III
AK UNIV. JEMBER.
Keperluan : IJIN PENELITIAN DALAM RANGKA TUGAS
AKADEMIK.
Judul : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN
PAJAK (REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN)
DAERAH KABUPATEN JEMBER
Waktu : 09 FEBRUARI 2004 S/D 31 MARET 2004

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.



HIDAYAT, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 510 063 004

Tembusan : Kepada Yth,
Sdr. Rektor Univ. Jember.



DAFTAR HADIR PKN

NAMA MAHASISWA : ANITA PUSPANINGTYAS.
 N I M : 010803102467.
 PROGRAM STUDI : D3 EKONOMI/ ADMINISTRASI KEUANGAN.
 FAKULTAS : EKONOMI

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	09-02-2004	1
2	10-02-2004	2
3	11-02-2004	3
4	12-02-2004	4
5	14-02-2004	5
6	16-02-2004	6
7	17-02-2004	7
8	18-02-2004	8
9	19-02-2004	9
10	20-02-2004	10
11	24-02-2004	11
12	25-02-2004	12
13	26-02-2004	13
14	27-02-2004	14
15	01-03-2004	15
16	02-03-2004	16
17	03-03-2004	17
18	04-03-2004	18
19	05-03-2004	19
20	08-03-2004	20
21	09-03-2004	21
22	10-03-2004	22
23	11-03-2004	23
24	12-03-2004	24
25	15-03-2004	25
26	16-03-2004	26
27	17-03-2004	27
28	18-03-2004	28
29	19-03-2004	29

Jember, 19 Maret 2004.

An. KEPALA DIPENDA KAB. JEMBER
 Kepala Bagian Tata Usaha,

DINAS
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Drs. Ec. MUNARI.
 NIP. 510 061 544.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / *173* / 436.324 / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANITA PUSPANINGTYAS
Program Studi : Mahasiswa Fak. Ekonomi
Diploma III Universitas Jember
A l a m a t : Jl. Halmahera III / 4 Jember

Telah melaksanakan penelitian denga topik :

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sejak tanggal 09 Februari s/d 19 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini untuk pergunaan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Maret 2004

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Kabag. Tata usaha

[Signature]
Drs. Ec. M U N A R I

Penata Tingkat I

NIP. 510 061 544

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : ANITA PUSPANIYAS
 No. Induk Mahasiswa : 010803102467
 Program Pendidikan : DIPLOMA III
 Program Studi : DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
 Judul Laporan : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME
 PADA SITUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Pembimbing : Drs. SUMAROT, MH
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal :

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	2 Februari 2004	ACC Proposal	1.
2.			2.
3.	29 April 2004	Prosedur Pengisian hub dan pda/danancanya, jelaskan	3.
4.			4.
5.			5.
6.	5 Mei 2004	ACC BAB I	6.
7.			7.
8.	21 Mei 2004	Revisi BAB II - pajak & cara koreksion baru pajak reklame	8.
9.			9.
10.			10.
11.	7 Juni 2004	BAB III Revisi struktur tmtg tugar?	11.
12.			12.
13.			13.
14.	16 Juni 2004	ACC BAB II & BAB III	14.
15.			15.
16.	30 Juni 2004	BAB IV Revisi Rekapitulasi pajak reklame	16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.	16 Juli 2004	ACC untuk dispondikan	20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.